

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa kemunculan wacana gender dalam kepemimpinan di keraton Yogyakarta menghadirkan berbagai respon publik salah satunya Muhammadiyah. Dalam hal ini Muhammadiyah memiliki sejarah kedekatan yang baik dengan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dalam respon wacana Gubernur perempuan Muhammadiyah memiliki persepsi. Secara garis besar terdapat beberapa variasi persepsi aktor Muhammadiyah DIY dalam merespon wacana gubernur perempuan. Pertama, dalam perspektif institusional, Muhammadiyah DIY memandang bahwa wacana gubernur perempuan merupakan urusan internal keraton, karena keraton memiliki regulasi-regulasi yang mereka terapkan dalam system politiknya tanpa harus ada intervensi dari luar.

Kedua, berbeda halnya dengan pandangan lembaga Muhammadiyah secara keseluruhan, beberapa personal muhammadiyah menganggap bahwa persoalan gender dalam kepemimpinan keraton bukan masalah yang harus diperdebatkan. Artinya, siapapun bisa menjadi pemimpin termasuk perempuan karena di dalam agama islam pun tidak melarang perempuan menjadi pemimpin. Ketiga, persepsi masyarakat Yogyakarta khusus nya beberapa kelompok aktivis yang menolak wacana gubernur perempuan melalui aksi demonstrasi dengan alasan melanggar dari sisi budaya, agama dan sisi hukum negara yang dimana jelas melanggar UUK.

## **SARAN**

Pra dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 88/PUU-XIV/2016 mengalami kontroversi membuat suatu wacana tersebut menjadi kegaduhan politik, namun putusan Mahkamah Konstitusi tidak seharusnya hanya berdasarkan asas dan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Negara. Sebaiknya penetapan tersebut juga melihat pertimbangan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membuat keputusan yang tidak diambil berdasarkan hanya dari kewenangan secara formal namun harus melibatkan pertimbangan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melihat proses pergantian Gubernur.

Posisi Keraton sebaiknya dipertegas sebagai pilar penjaga tradisi dan kebudayaan, dan seharusnya keraton dijadikan sebagai pusat pengembangan sekaligus pelestarian kebudayaan Jawa khususnya Yogyakarta. Keraton juga seharusnya menepatkan diri diluar lingkungan kekuasaan politik, justru penempatan keraton di lingkaran politik berpotensi menurunkan kewibawaan keraton di mata masyarakat, sebaiknya lebih bijak mengambil keputusan dan menfokuskan dalam penjagaan tradisi atau pengembangan kebudayaan.

Dari sisi kebudayaan banyak pihak melihat keraton harus dipertegas posisinya sebagai pilar penjaga tradisi dan kebudayaan, bahwa keraton harus dijadikan sebagai pusat pengembangan dan pelestarian kebudayaan Jawa. Keraton harus menempatkan diri di luar lingkungan kekuasaan politik yang syarat dengan kepentingan sesaat dan lebih bijak.